



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERANG LUSI JUANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNARTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 209026

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.405.810.000**

1. Tanah Seluas 484 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 451.560.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 357.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/180 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 596.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 518.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
5. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HIBAH TANPA AKTA Rp. 115.000.000
7. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.620.135.400
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	890.206.214
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.434.151.614
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.284.151.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.